

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH
UKURAN PEMERINTAN, TINGKAT KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**
*(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2017)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

EDO ANGGARA
NIM/BP: 1207087/2012

**JURUSAN AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

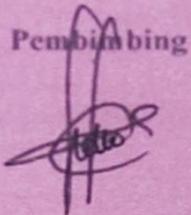
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nama : Edo Anggara
NIM/TM : 1207087/2012
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

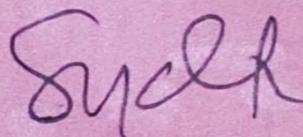
Padang, 6 Februari 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing


Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nama : Edo Anggara

NIM/TM : 1207087/2012

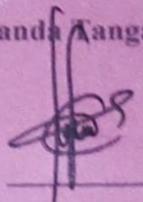
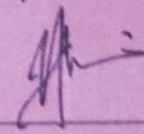
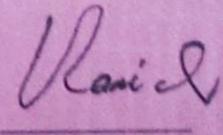
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Sektor publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 6 Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Charoline Cheisviyanny, S.E.,MAk	1. 
2	Anggota	Herlina Helmi, S.E.,M.S.Ak	2. 
3	Anggota	Vanica Serly, S.E.,M.SI	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edo Anggara
NIM/Tahun Masuk : 1207087/2012
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman 19 Agustus 1994
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Jendral Sudirman no 64 Pariaman tengah, Kota Pariaman
No. HP/Telp : 085264376137/-
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Ukuran Pemerintah Daerah,Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 6 Juli 2020

Yang Menyatakan



Edo Anggara
1207087/2012

ABSTRAK

EDO ANGGARA

1207087/2012)

: Pengaruh PAD Pemerintah Daerah Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Pembimbing

: 1. Charoline Cheisviyanny, SE, Ak, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari PAD pemerintah daerah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pemilihan sampel menggunakan metode total sampling. PAD pemerintah daerah diukur dengan menggunakan logaritma natural dari pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset pemerintah daerah dalam LKPD, tingkat ketergantungan pemerintah daerah diukur dengan dana transfer dibagi total pendapatan, temuan audit diukur dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai sig $0,000 < 0,05$, serta nilai $t_{hitung} 3,785 > t_{tabel} 2,006$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **Hipotesis H3 Diterima** Secara keseluruhan penelitian ini dapat memberi kontribusi secara empiris sebesar 28,91%. Sedangkan variabel PAD Pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah serta temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pemerintah, Ukuran Pemerintahan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Salawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan agar menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Charoline Cheisviyanny SE, M,Ak, selaku Pembimbing I, serta Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Pembimbing II, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, MS. Ak, CA, selaku Penelaah Iyang telah memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Sanny Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Staf tata usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
5. Kedua orang tua tercinta saya yang telah memberikan kesungguhan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan, Muhammad Arief, Muhammad Fadli, Ferry Hardiansyah.
7. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis memohon maaf jika banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penuliskan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis selalu bersyukur dengan apa yang telah diperoleh penulis selama ini dan masih banyak yang ingin penulis

ungkapkan, dan semoga semua pihak yang membantu diberikan kemudahan dan dibalas segala yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Penulis sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan metode penelitian. Namun, jika terdapat kesalahan, mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang 6 Juli 2020

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Edo Anggara'.

Edo Anggara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
Rumusan Masalah	10
Tujuan Penelitian.....	10
Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS ...	13
Kajian Teori.....	13
1. Pengungkapan Laporan Keuangan	17
2. Ukuran Pemerintah Daerah.....	22
3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah.....	23
4. Temuan Audit	23
5. Stewardship Theory	24
6. Agency Theory	25
Penelitian Terdahulu.....	28
Hubungan Antar Variabel	35
Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
Jenis Penelitian	39
Populasi dan Sampel	39
1. Populasi	39
2. Sampel	40

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	41
1. Jenis Data.....	41
2. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	43
1. Variabel Dependen (Y).....	43
2. Variabel Independen (X)	43
G. Penarikan Kesimpulan.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
Deskriptif Variabel Penelitian	46
Statistik Deskriptif.....	55
Uji Asumsi Klasik	61
1. Uji Multikolinearitas.....	61
2. Uji Autokorelasi.....	63
3. Uji Heteroskedastisitas	64
Hasil Analisis Data	65
1. Uji Koefisien Determinasi	65
2. Uji Hipotesis	66
Pembahasan	65
1. Pengaruh PAD pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan	66
2. Pengaruh Ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan	67
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	72
Kesimpulan.....	72
Keterbatasan Penelitian	73
Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

1. Arah dan signifikansi penelitian sebelumnya.....	30
2. Daftar sampel kabupaten/kota di provinsi sumatera barat	40
3. Sumber data dari masing-masing variabel	41
4. Data tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.....	48
5. Data hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah	49
6. Data Ukuran Pemerintah Daerah	51
7. Data Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	54
8. Jumlah temuan audit	56
9. Analisis statistik deskriptif	60
10. Hasil Spss Uji Multikolinearitas	62
11. Hasil Spss Uji Autokorelasi	63
12. Hasil Spss Uji Heteroskedastisitas	64
13. Hasil Spss Uji Koefisien Determinasi	65
14. Hasil Spss uji t-test (Hipotesis penelitian)	66
15. Hasil Spss Uji F-Simultan.....	70

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	37
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Olah Data Dari LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota79
2. Hasil Olah Data Dari Program Spss80
3. Daftar Checklist Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota.....81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Dikenal dengan *E-life*. kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. dan sekarang ini semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan E, seperti *e-commerce*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, dan yang lain-lain berbasis elektronika.

Perubahan sistem dan kemajuan teknologi juga berdampak pada pengelolaan sistem pada pemerintahan dari awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga Perubahan ini menyebabkan adanya perubahan sistem pertanggung jawaban pada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dari pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, penggunaan internet dan intranet yang mempunyai kemampuan untuk menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem informasi dan jaringan internet. yang lebih umum dikenal dengan *world wide web*. Pada dasarnya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Proses menggunakan teknologi informasi telah banyak memudahkan aktivitas

entitas ekonomi, yang sebelumnya dengan proses manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani 2012) masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, murah, dan mudah. Salah satunya dengan menggunakan *website*. Pemerintah daerah juga menggunakan *Website* sebagai salah satu sarana dalam penyampaian akuntabilitas pelaksanaan anggaran daerah kepada publik.

Fenomena dalam penelitian ini adalah masih kurangnya keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelayan bagi masyarakat wajib melaporkan berbagai informasi keuangan kepada masyarakat luas. Sebab masyarakat juga merupakan salah satu pemakai informasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus dapat menampilkan informasi keuangan yang dibutuhkan masyarakat di dalam website pemerintah daerah itu sendiri.

Pada saat sekarang ini pemerintah masih banyak yang belum melakukan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah ke dalam website pemerintah daerah. Padahal hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No.14 tahun 2008, mengenai transparansi pengelolaan anggaran dan daerah serta transparansi informasi keuangan daerah.

Maka dari itu pemerintah daerah wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat di dalam website pemerintah daerah. Dengan masih kurangnya kesadaran pemerintah dalam melaporkan informasi keuangan daerah di dalam website pemerintah daerah menarik peneliti untuk mengetahui hal apa yang mendasari tindakan pemerintah daerah tersebut.

Website pemerintah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dari pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara, menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al, 2005).

Penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi keuangan daerah, telah dilakukan di New Zealand. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laswad, Fisher & Oyelere (2005), beberapa pemerintahan lokal di New Zealand memilih untuk menyediakan pengungkapan pelaporan keuangan di internet. Hasil penelitian atas pengungkapan dengan internet memberikan pengembangan akan kegiatan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan di New Zealand.

Beberapa peraturan di Indonesia juga telah menyebutkan secara implisit mengenai memanfaatkan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 Tahun 2008).

Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

Kendati demikian menurut laporan *Corruption Perceptions Index* 2015, peringkat Indonesia baru menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur, dengan skor sebesar 36 dari total 100 poin maksimum (*Transparency International*, 2016). Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pengguna internet Indonesia diperkirakan akan mencapai 112 juta orang di tahun 2017 atau naik ke peringkat 5 dunia dari peringkat 6 saat ini (Yusuf, 2014). Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet, di tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemda mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 diungkapkan bahwa ternyata mayoritas Pemda masih enggan mempublikasikan pengelolaan anggaran pada situs resminya. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan IFR pada *website* pemerintah.

Website adalah sebagai media pengungkapan informasi mempunyai beberapa karakteristik dan keunggulan seperti mudah menyebar luas (*prevasiveness*), real-time, berbiaya rendah (*low cost*), dan mempunyai

interaksi yang tinggi (*hight interaction*) (Ashbaugh *et al.* , 1999) *website* juga dapat mengintegrasikan teks, gambar-gambar bergerak, dan suara-suara (Debreceeny *et al.* ,2002). Karakteristik yang lengkap tersebut membuat pemanfaatan *website* dapat dengan mudah diterima dan menjadi populer di kalangan masyarakat.

Beberapa penelitian, seperti penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014), menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan pengungkapan sukarela di sektor publik. Hasil penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian Trisnawati dan Komarudin, dimana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kekayaan daerah memiliki hubungan yang negatif dengan pelaporan keuangan melalui internet.

Dari hasil pengamatan, kedua penelitian ini juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih menambah referensi atas faktor-faktor yang menentukan tingkat pelaporan akuntansi oleh pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat yang memang belum banyak diteliti.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014). Hasil penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang (*leverage*), dan kekayaan pemerintah daerah memiliki

asosiasi terhadap pilihan dari pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya di internet yang kemudian mendorong otoritas daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih transparan.

Alasan dipilihnya penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) sebagai acuan utama ialah bahwa dalam penelitian Trisnawati dan Komarudin telah mencakup variabel-variabel yang lebih kompleks dan beragam daripada penelitian sebelumnya.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) ialah penelitian ini tidak menggunakan variabel rasio utang (*leverage*) atau rasio solvabilitas, kompetisi politik, tipe pemerintah daerah dan opini audit karena perbedaan demografi antar daerah yang menyebabkan ketersediaan data tidak mendukung, namun peneliti menambahkan dua variabel yaitu variabel kompleksitas pemerintah daerah dan belanja daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Selain itu, sampel dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat disebabkan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, hal ini terbukti masih banyaknya jumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan yakni sebanyak 212 temuan pada tahun 2015, 240 temuan pada tahun 2016, dan 270 temuan pada tahun 2018, selain itu pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat, masih sangat minim dalam transparansi keterbukaan informasi laporan keuangan kepada

masyarakat didalam website pemerintah daerah, hal ini terbukti masih jarang dari pemerintah daerah yang menampilkan secara menyeluruh kinerja laporan keuangan pemerintah daerah dari Tahun 2015-2017 di dalam website masing-masing pemerintah daerah. Hanya ada beberapa pemerintah daerah saja yang menerapkan transparansi dalam laporan keuangan yang telah dibuat diantaranya adalah: kabupaten lima puluh kota dan pemerintah kota bukittinggi, serta pemerintah kota padang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pemda yang memiliki *website* resmi telah mengungkapkan informasi keuangan dalam website Pemda, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses *website* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Karakteristik,Kompleksitas,dan temuan audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemda”. Alasan dipilih nya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Barat sebagai sampel adalah karena masih belum adanya penelitian terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Yang hanya fokus terhadap lingkup yang lebih sempit, serta adanya hasil penelitian Hilmi (2010) yang menemukan bahwa pengungkapan tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Sementara dari siaran pers yang diakses dari www.bpk.go.id (2013) menunjukkan bahwa masih banyak LKPD belum mencapai sempurna. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan lain, apakah pencapaian opini belum maksimal yang mampu menunjukkan tingginya rendahnya pengungkapan LKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang

ada di Indonesia. Beberapa komponen yang dapat diperoleh pemerintah daerah terkait dari laporan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Informasi Laporan Keuangan

Informasi merupakan outcome dari sebuah sistem informasi. Sumber pembentukan informasi adalah data yang kemudian diolah. Dalam bukunya yang berjudul "*Accounting Information System*" Marshall (2003:20) menyatakan bahwa data adalah :

Sebagai fakta atau angka, dan simbol mentah tersebut merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Sebaliknya informasi terdiri data yang telah ditrasformasikan dan dibuat lebih memadai melalui pemrosesan. Idealnya informasi merupakan pengetahuan yang berarti dan berguna bagi pemakainya untuk mencapai tujuan.

B. Jenis-jenis informasi

Informasi-informasi yang tersedia dalam sebuah perusahaan beragam jenisnya. Pada umumnya informasi terdiri dari informasi kuantitatif dan non-kuantitatif. Informasi akuntansi adalah bagian dari informasi kuantitatif, dimana informasi ini kemudian di bagi lagi menjadi operasi operasional, informasi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen.

Informasi oprasional adalah data rinci mengenai operasi utama perusahaan. informasi akuntansi menyajikan informasi mengenai aktivitas suatu perusahaan dalam bentuk kuantitatif.

Data-data ekonomis mengenai aktivitas perusahaan ini merupakan informasi yang banyak digunakan oleh pihak ekstern perusahaan untuk membuat

keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan output dari sistem informasi akuntansi

C. Hal yang diungkapkan dalam informasi akuntansi

Laporan keuangan pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat oleh sebagian besar pemakai dalam keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dan waktu kepastian dari hasil tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan akuntansi yang menghasilkan informasi, meliputi laporan laba rugi, laporan equitas pemilik, neraca dan laporan arus kas. komponen laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan lengkap terdiri dari :

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang secara langsung berkaitan dengan posisi keuangan yang terdiri dari 3 unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan equitas (modal). Neraca juga dapat didefinisikan sebagai laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu (*a point of time*), misalnya per 31 desember

2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja yang menggambarkan penghasilan dan beban perusahaan, selama

periode tertentu (*a point of time*), laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos pendapatan, laba rugi perusahaan, beban pinjaman, beban pajak, laba rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas dan laba atau rugi bersih periode berjalan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan Perubahan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas dan memungkinkan para pengguna menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai perusahaan.

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, penyusunan Laporan Arus kas baru diberlakukan di Indonesia pada tahun 1994 yaitu dengan PSAK No. 2.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang mengungkapkan

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

- b. Informasi tambahan yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kekayaan daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah ?
2. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah ?
3. Apakah pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website pemerintah daerah ?
4. Apakah Pengaruh temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pemerintah daerah menjalankan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan melaporkan informasi keuangan pada situs pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pengkajian ini fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan informasi keuangan daerah dalam website Pemda. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam website Pemda?
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Untuk mengetahui apakah tingkat ketergatungan pada pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah ?
4. Untuk mengetahui temuan audit juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah pada website pemerintah daerah?

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para akademisi, Pemerintah Daerah, dan regulator. Adapun manfaat yang diberikan antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya dengan menganalisa lebih mendalam praktek pengungkapan sukarela atas informasi keuangan dan transparansi pemerintah serta *e-government*. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah menjadi lebih *concern* terhadap perkembangan dan kegunaan IT dan internet. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah

menjadi *feedback value* untuk perkembangan daerahnya serta memotivasi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan situs resminya menggunakan sarana dalam penyampaian informasi lebih mudah dan lebih cepat di akses oleh pengguna laporan keuangan baik pihak intenal maupun eksternal yang membutuhkan laporan informasi keuangan .

3. Regulator

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada regulator, terutama mengenai pentingnya pengungkapan informasi di dalam media internet untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat dengan semakin berkembangnya kemampuan IT dan internet di Indonesia sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan mudah mengaksesnya..

4. Publik

Dengan penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui pemerintah mana saja yang memberikan informasi keuangannya pada situs dan dapat melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan daerah pada situs tersebut.

5. Investor, Kreditor, dan Donator

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh investor, kreditor, dan donator sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama di bidang keuangan dengan suatu pemerintah daerah.